BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Erick S. Holle, menuliskan bahwa kontak langsung dalam pemberian pelayanan memberi peluang yang besar terjadinya praktek maladministrasi. Oleh karenanya, maka diperlukan sebuah upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bingkai *electronic government* dalam pemberian pelayanan, sehingga kontak langsung antara penyedia layanan dan pengguna layanan tidak lagi terjadi. Di Indonesia, peluang untuk itu sudah ada dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov (electronic-Government framework)*, salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Safitri Jaya menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu G2C, G2B, maupun G2G, indonesia saat ini masih tertinggal jauh. Layanan *back office* (G2B) masih belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap layanan *front office* (G2C dan G2B), hal itu juga disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholder. Penerapan ICT yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat bahkan strategi pengembangan *E-Government* belum sepenuhnya dilaksanakan. Sampai saat ini layanan portal hampir dimiliki oleh hampir semua lembaga pemerintah, lembaga

pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah, tetapi pemanfaatan IT dalam hal ini masih sangat minim, administrator web hanya melakukan *update* berdasarkan informasi sekunder seperti dari surat kabar, internet dan hasil perbandingan opini publik.

Aprilia Arisanti, melakukan penelitian yang menghasilkan saran adalah untuk pengembangan selanjutnya agar lebih baik yaitu sistem yang lebih kompleks dan dilengkapi dengan peta potensi desa dan peta potensi masyarakat. Dari penelitian tersebut apabila akan dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan maka keluaran dari sistem yang dihasilkan adalah terdapat peta potensi tentang pengajuan izin penelitian dan KKN di Kabupaten Bantul dan perluasan kajian mengenai pengembangan sistem dengan menggunakan metode *Extreme Programming (XP)*

Wahyu Gugus Nurcahyo, melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah berhasil membangun *CMS (Content Management System) E-Government* di Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempermudah administrator instansi mengelola website.
2. Penggunaan metode *Extreme Programming* sangat membantu dalam proses pengembangan website dikarenakan menerapkan beberapa iterasi yang masing-masing iterasi terdapat tahapan planning, design, coding, dan testing dimana setiap iterasi hanya menciptakan desain sederhana berdasarkan kebutuhan saat ini atau mendesak, kalaupun ada perbaikan atau penambahan dapat dilakukan pada iterasi berikutnya, dan adanya umpan balik antara

pengembang dan pihak instansi sehingga dengan menggunakan metode *Extreme Programming* akan terjalin komunikasi yang efektif, menghemat waktu pengembangan website, serta kedisiplinan dalam pengembangan website instansi.

3. Penggunaan metode *Extreme Programming* dan *Framework Codeigniter* dapat mempercepat waktu pengembangan website instansi yang dibuktikan dengan adanya perbedaan antara perencanaan jadwal pengembangan dengan waktu pengembangan, dimana waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan website secara riil lebih cepat daripada perencanaan jadwal yang telah dibuat.

Pada penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan penelitian Wahyu Gugus Nurcahyo, adalah pada penelitian ini membangun *E-Government* untuk sebuah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Perizinan Penelitian dan KKN di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Bantul dengan menggunakan *framework* PHP YII dan pengembangan sistem menggunakan pendekatan metode pengembangan sistem secara umum.